BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana dalam Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg, terdakwa telah memenuhi unsur kesalahan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang memuat unsur-unsur yaitu: Setiap orang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara melaksanakan akibat dari tindak pidana korupsi yang telah dilakukan dan menimbulkan akibat hukum dengan menjalani pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah masing-masing sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing 6 (enam) bulan, Terdakwa I Drs. Davitson Dan Terdakwa II Nazar, SE. Terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana Korupsi, dikarenakan telah melanggar kewenangan yang ada, serta menyalahgunakan jabatannya dengan membuat Surat Pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan uang yang dipergunakan untuk kegiatan KONI.
2. Pembebanan uang pengganti kepada saksi dalam perkara korupsi dapat dilakukan jika terbukti saksi menikmati hasil tindak pidana, sebagaimana diatur Pasal 32 UU Tipikor. Hakim betugas untuk memeriksa dan memutus perkara

merupakan bentuk nyata asas *intra petita*. Pengembalian kerugian negara dapat dilakukan melakukan gugatan kepada pihak diluar terdakwa dan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai pengacara negara. Langkah ini bertujuan memulihkan kerugian negara (*restitutio in integrum*). Penerapannya harus melalui pembuktian yang sah dan sesuai prinsip *due process of law*, sehingga bersifat pemulihan, dan tidak terjadinya perluasan pidana.

B. Saran

Adapun saran-saran yang diajukan dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penegak Hukum (Jaksa Penuntut Umum), disarankan agar penegak hukum, khususnya Jaksa Penuntut Umum (JPU), lebih cermat dan mendalam dalam menggali fakta persidangan, terutama terkait keterlibatan pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari tindak pidana, meskipun tidak secara langsung melakukan perbuatan pidana. .
2. Kepada Lembaga Peradilan, Perlu adanya konsistensi antara pertimbangan hukum dengan amar putusan. Apabila terdapat indikasi keterlibatan pihak lain seperti saksi dalam pertimbangan putusan, maka sebaiknya disertai dengan langkah hukum yang jelas agar tidak terjadinya *ultra petita* dalam memutus perkara hukum. Hal ini penting untuk menghindari multitafsir dan potensi pembebanan tanggung jawab kepada pihak yang tidak diadili secara resmi dalam persidangan.